

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto dkk, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012)
- Ali Abdullah, Teori & Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara PascaAmandemen, Cetakan-2, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Asmara, Galang, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara RepublikIndonesia*, Yogyakarta : Laksbang pressindo
- Asmawi Rewansyah, Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik, (Jakarta: CV Yusaintanas Prima, 2011)
- Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, Jurnal Pro Justisia, Volume IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Kencana, Jakarta: 2009
- Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Cetakan-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta Timur : PRENADAMEDIA, 2016
- Hayat, Manajemen Pelayanan Publik, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 53
- <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-592947428/proses-lambat-hingga-pungli-ombudsman-banten-terima-ratusan-pengaduan-soal-pelayanan-kelurahan-dan-desa>
- <https://pendidikan.co.id/pengertian-ajudikasi-contoh-beserta-tahapan-ajudikasinya/>, diakses pukul 20:24 tanggal 17 Juni 2023
- Husni, Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Jakarta : Aswaja Pressindo, 2013

Intan Meitasari, Shinta Hadiyantina, Indah Dwi Qurbani, Urgensi Ajudikasi Khusus Ombudsman Republik Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik. Bina Mulia Hukum vol 5, no 1 2020

Ismail Nawawi, *Public Policy Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009)

Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia kontemporer, dalam wisuda sarjana hukum Fakultas hukum universitas sriwijaya Palembang 24 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No.25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.

Kristian Widya Wicaksono, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, Cetakan-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

M. Chaerul Andi Anas, Penerapan Ajudikasi Khusus oleh Ombudsman Republik Indonesia terhadap Penyelenggara Negara yang Maladministrasi, vol 7 No. 1 2020.

M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Surabaya : Bina Ilmu, 1987

Malonda, Herwyn Jefler Hielsa, Adjudikasi Dalam Prespektif Teori, vol 2 No. 1, 2021

Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016)

Moh Hasyim, "Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dengan Ombudsman" *Jurnal Ombudsman Daerah*, Volume 8, Th, Nomor V, Juli-Desember, 2010

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional/Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 57

- Ongky Setio Kuncoro, sejarah pembentukan dan perkembangan Ombudsman di Indonesia, artikel ekonomi dan manajemen, No. 504/Januari 2015
- Peraturan Ombudsman nomor 26 tahun 2017 tentang tata cara penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian laporan
- Peraturan ombudsman nomor 31 tahun 2018 tentang mekanisme dan tata cara adjudikasi khusus
- Ramiyanto, Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018)
- Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1985)
- Surjadi, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009)
- Suyud Margono, ADR & Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum), (Bogor: Ghalia Indonesia, 2000 )
- Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, (Jakarta:Prenada Media Group, Cetakan-2, 2011)
- Ugo dan Pujiyo, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Cetakan-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Waters, Malcolm, Modern Sociological Theory, Sage Publication,  
London, Thousand Oaks, New Delhi, 1994

Wawancara dengan bapak rizal nurjaman kepala keasistenan  
ombudsman ri perwakilan provinsi banten bidang pencegahan  
maladministrasi tanggal 30 april jam 10.29 wib

